

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunianya, penyusunan Rencana kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Materi yang disusun secara partisipatif dari segenap pegawai dilingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan menjadi komitmen bersama untuk melaksanakan konsisten dan bertanggungjawab. Selain itu dengan Renja ini, diharapkan dapat diketahui tingkat keberhasilan kinerja selama satu tahun. Badan kesatuan Bangsa dan Politik sebagai penanggungjawab teknis sekaligus sebagai salah satu bentuk akuntabilitas.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 dirinci dalam perencanaan tahunan dalam bentuk Program sebagai acuan dalam pengajuan anggaran.

Demikian Renja ini dibuat semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi setiap rencana yang baik kedepan untuk Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara yang lebih baik lagi.

Tobelo, 9 Januari 2024
Kepala KESBANGPOL



Drs. Anwar S. Kabalmay

PEMBINA Tk.I IV/b

NIP. 196802021988031006

BAB I

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024 merupakan penjabaran tahunan yang memuat seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah secara terinci dan terukur yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Penekanannya adalah pada sesuatu yang akan diraih atau diperoleh pada akhir tahun anggaran.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagai konsekuensi dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka seluruh program dan kegiatan dalam Perangkat Daerah akan mengacu dan berpedoman pada Peraturan dimaksud.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah, disusun kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional serta bagaimana pengorganisasian Program Kegiatan dan sub kegiatan Pelayanan PD sesuai dengan Tupoksinya.

Selanjutnya Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Halmahera Timur di Provinsi Maluku Utara;

2. Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor : 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2017, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Presiden RI Nomor : 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan;

11. Kepmen Dgri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodevikasi Dan Nomenklatur Perencanaaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 9 Tahun 2012, tentang RTRW Kabupaten Halmahera Utara;
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Negeri sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 14 Tahun 2005)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilaya Kabupaten Halmahera Utara.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016, Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tahun 2024 dimaksudkan untuk merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Halmahera Utara selama satu tahun. Rumusan yang disusun adalah Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2024. Rumus yang disusun adalah wujud dari perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan dan diharapkan berkontribusi dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Halmahera Utara yang memuat program, kegiatan dan sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaannya oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang adalah :

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 sebagai bahan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2024
- b. Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2024 dan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) kedalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA -PPAS) Tahun 2024;
- c. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Halmaherera Utara;
- d. Menetapkan pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 dengan menitikberatkan pada program-program prioritas;

1.4. Sistematika Penulisan

- **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

- **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN**

POLITIK TAHUN LALU

Pada bab ini dijelaskan mengenai evaluasi RENJA Tahun 2023 dan capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Analisis kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik, Isu-isu penting, Review terhadap Rancangan awal RKPD, serta Penelaahan usulan masyarakat.

- **BAB III. TUJUAN & SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN**

POLITIK

Pada bab ini dijelaskan mengenai Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Program dan kegiatan.

- **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN**

BANGSA DAN POLITIK

Pada bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 yang berkontribusi terhadap target dan pencapaian indikator kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- **BAB V. PENUTUP**

BAB II

**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
(BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK) TAHUN 2023**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2023.

Tahapan evaluasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses perencanaan. Tahapan evaluasi dimaksudkan untuk menilai sudah sejauh mana proses perencanaan Badan Kesatuan bangsa Dan Politik dilaksanakan. Tahapan evaluasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berdampak pada terhambatnya proses pelaksanaan tersebut. Hasil evaluasi tersebut, selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan atau langkah-langkah strategis dalam perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan dalam melaksanakan rencana pembangunan adalah konsistensi dokumen perencanaan secara berjenjang ketersediaan dokumen perencanaan sesuai ruang lingkup, jenjang serta tepat waktu. Catatan capaian kinerja baik dalam bentuk keluaran (output) maupun hasil (outcome), dalam pelaksanaan pembangunan tahun lalu akan dipaparkan berikut serta disajikan dalam bentuk tabel yang juga memuat capaian pada Tahun 2023.

Pada tahun 2023, jumlah anggaran yang dikelola Badan Kesatuan bangsa Dan Politik pada APBD Perubahan sebesar Rp. 7.781.820.130,00;-

yang diperuntukan untuk Belanja Operasional sebesar Rp. 7.757.499.130,00;- dan Belanja Modal sebesar Rp. 24.321.000. Dari total jumlah anggaran tersebut, yang terealisasi sampai di triwulan II tahun 2023 sebesar Rp. 618.127.480,00 atau dengan presentase 7,94. Secara rinci dapat diuraikan bahwa realisasi Besaran alokasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada

Belanja Operasional dan belanja Modal untuk melaksanakan 6 (empat) program dan 11(sembilan) kegiatan dan 32 (dua pulu tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan surat menyurat;**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtsar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan karakter Kebangsaan.

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya politik.

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;
 - Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.

- Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

4. Pogram Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
 - Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya.

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - Penyusunan Bahan perumusan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan ummat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;

- Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial.
- Penyusunan Program Kerja di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah;
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah;
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah;

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

NO	URUSAN/BI DANG URUSAN URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA PROGRA M / KEGIATA N/SUB KEGIATA N	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2021 S/D TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA s/d TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2023		REAL ISASI KINE RJA PADA TRIW ULAN		REALISAS I CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARA N RENJA S/D TW I I TAHUN 2023		TINGKA T CAPAIA N KINERJ A DAN ANGGA RAN RENJA (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023)		TINGKA T CAPAIA N KINERJ A DAN REALIS ASI ANGGA RAN RENST RA s/d TAHUN 2023 (%)		PER AN GK AT DAE RAH PEN AN GG UN G JA WA B
										II										
1	2	3	4			5		6		8		9=(7+8)		10=(9/6)* 100		11=(9+5)		12=(11/ 4)*100		13
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	R	p.	K	Rp.	K	R	p.	K	Rp.	
	Pelaksanaa n Unsur Pemerintah an Umum																			
	Kesatuan Bangsa dan Politik																			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100,00	%	20.688.209.813	77, 74	4.968.143.060	90, 00	3.541.215.237		94 6. 93 3. 82 7	0, 00	946.9 33.82 7	0,0 0	2 6, 7 4	38 , 8 7	5.915.076.887	3 8 , 8 7	28,5 9	Bad an Kes atua n Ban gsa Dan

**TAHUN
2024**

13

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

1.1.1	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					-	1	2.000.000,00		-	0	-	0,00	0,00	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.1.1	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					-	1	2.000.000,00		-	0	-	0,00	0,00	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.1.1	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	10	Lap	35.725.000	8	21.909.500	1	2.000.000,00		-	0	-	0,00	0,00	8	21.909.500	80,00	61,33	

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

		Kinerja SKPD																	
1,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)	100,00	%	17.205.650.458	58,11	4.207.380.060	100,00	3.061.755.271	850.289.827	0,00	850.289.827	0,00	27,77	29,06	5.057.669.887	29,06	29,40	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedian ya Gaji Dan Tunjangan ASN	3094	Org	17.205.650.458	437	4.207.380.060	520	3.061.755.271,00	850.289.827	0	850.289.827	0,00	27,77	437	5.057.669.887	14,12	29,40	
1,3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	%	270.177.382	66,50	31.900.000	100,00	30.000.000	-	0,00	-	0,00	0,00	33,25	31.900.000	33,25	11,81	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					-	20	15.000.000,00	-	0	-	0,00	0,00	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26	Org	270.177.382	2	31.900.000	1	15.000.000,00	-	0	-	0,00	0,00	2	31.900.000	7,69	11,81	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	95,00	%	1.271.350.310	90,00	230.766.600	100,00	145.459.966	25,207,600	0,00	25.207.600	0,00	17,33	45,00	255.974.200	47,37	20,13	
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46	Pkt	250.586.808	5	53.548.000	7	25.000.000,00	-	0	-	0,00	0,00	5	53.548.000	10,87	21,37	
1.4.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Pkt	93.249.700	2	19.555.600	1	10.000.000,00	2,400,200	0	2.400.200	0,00	24,00	2	21.955.800	33,33	23,55	
1.4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6	Dok	85.150.000	2	17.372.000	1	10.000.000,00	2,250,000	0	2.250.000	0,00	22,50	2	19.622.000	33,33	23,04	

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

		Undangan yang Disediakan																	
1.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	Lap	93.743.836	2	27.970.000	1	20.000.000,00	4.932.400	0	4.932.400	0,00	24,66	2	32.902.400	33,33	35,10	
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	Lap	748.619.966	2	112.321.000	1	80.459.966,00	15.625.000	0	15.625.000	0,00	19,42	2	127.946.000	33,33	17,09	
1,5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	%	916.281.663	100,00	234.368.900	100,00	127.000.000	23.358.400	0,00	23.358.400	0,00	18,39	50,00	257.727.300	50,00	28,13	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	Lap	611.001.699	2	175.147.900	1	92.000.000,00	22.080.900	0	22.080.900	0,00	24,00	2	197.228.800	33,33	32,28	

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

1.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Lap	64.000.000	2	12.990.000	1	10.000.000,00	1.277.500	0	1.277.500	0,00	12,78	2	14.267.500	33,33	22,29	
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	Lap	241.279.964	2	46.231.000	1	25.000.000,00	-	0	-	0,00	0,00	2	46.231.000	33,33	19,16	
1,6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	%	956.835.000	100,00	234.818.000	100,00	160.000.000	41.078,00	0,00	41.078.000	0,00	25,67	50,00	275.896.000	50,00	28,83	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	756.585.000	1	234.818.000	1	110.000.000,00	31.140,00	0	31.140.000	0,00	28,31	1	265.958.000	16,67	35,15	

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

1.6. 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	200.250.000	-	1	50.000.000,00	9.938.000	0	9.938.000	0,00	19,88	0	9.938.000	0,00	4,96
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan karakter Kebangsaan	Persentase keterlaksanaan fasilitasi penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	10,00	%	2.984.110.340	44,21	100,00	600.000.000	-	0,00	-	0,00	0,00	22,10	781.671.900	221,03	26,19
2,1	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	10,00	%	2.984.110.340	88,41	100,00	600.000.000	-	0,00	-	0,00	0,00	44,21	781.671.900	442,05	26,19

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

2.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	19	Dok	320.000.000	1	275.000.000	2	30.000.000,00			0	-	0,00	0,00	1	275.000.000	5,26	85,94		
2.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun.	10	Dok	319.110.340	1	196.672.000	2	30.000.000,00			-	0	-	0,00	0,00	1	196.672.000	10,00	61,63	

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	120	Orang	1.400.000.000,00	0	0	30	350.000.000,00										
2.1.3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	70	OK	820.000.000	9	234.999.900	10	165.000.000,00	-	0	-	0,00	0,00	9	234.999.900	12,86	28,66	

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

2.1.4	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6	Lap	125.000.000	1	75.000.000	1	25.000.000,00	-	0	-	0,00	0,00	1	75.000.000	16,67	60,00	
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya politik.	Persentase keterlaksanaan fasilitasi peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100,00	%	20.237.365.728	100,00	6.759.431.150	100,00	3.454.760.714	80,000,000	0,00	80,000,000	0,00	2,32	50,00	6.839.431.150	50,000	33,80	

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

3,1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100,00	%	20.237.365.728	10 0,0 0	6.759.431.150	10 0,0 0	3.454.760.714	80 .0 00 .0 00	0, 00	80.00 0.000	0,0 0	2, 3 2	50 ,0 0	6.839.431.150	5 0 , 0 0	33,8 0	
-----	---	--	--------	---	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------------------	----------	----------------	----------	--------------	---------------	---------------	-----------------------	-----------	--

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

3.1. 1	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah an, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah an, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Yang Disusun .	8	Dok .	80.000.000	1	467.695.000	2	20.000.000,00		0	-	0,0 0	0, 0 0	1	467.695.000	1 2 , 5 0	584, 62	
-----------	--	---	---	-------	------------	---	-------------	---	---------------	--	---	---	----------	--------------	---	-------------	-----------------------	------------	--

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

3.1. 2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah an, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi , Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah an, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	6	Lap	16.534.270.828	1	2.632.520.500	1	3.000.000.000,00	80 .0 00 .0 00	0	80.00 0.000	0,0 0	2, 6 7	1	2.712.520.500	1 6 , 6 7	16,4 1	
-----------	--	---	---	-----	----------------	---	---------------	---	------------------	----------------------------	---	----------------	----------	--------------	---	---------------	-----------------------	-----------	--

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

3.1. 3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah an, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi , Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	120	Org	865.405.001	0	61.533.450	20	54.760.714,00	-	0	-	0,0 0	0, 0 0	0	61.533.450	0 , 0 0	7,11	
-----------	---	--	-----	-----	-------------	---	------------	----	---------------	---	---	---	----------	--------------	---	------------	------------------	------	--

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

3.1.4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	104	Org	2.617.690.200	0	3.572.792.200	12	360.000.000,00	-	0	-	0,00	0,00	0	3.572.792.200	0,00	136,49	
-------	---	---	-----	-----	---------------	---	---------------	----	----------------	---	---	---	------	------	---	---------------	------	--------	--

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

3.1. 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan, Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6	Lap	139.999.699	0	24.890.000	1	20.000.000,00	-	0	-	0,00	0,00	0	24.890.000	0,00	17,78	
4	Pogram Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Persentase keterlaksanaan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi	100,00	%	250.000.000	0	-	100	100.000.000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

		kemasyar akatan																	
4,1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100,00	%	110.000.000	0	-	100	100.000.000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
4.1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	10	Dok	110.000.000	0	-	2	15.000.000		0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

4.1.2	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20	Orang	140.000.000	0	-	5	35.000.000	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0,00	0,00
4.1.3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12	Orang	200.000.000	0	-	3	50.000.000	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0,00	0,00

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

	PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase keterlaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100,00	%	1.295.239.286	0	#VALUE!		495.239.286										
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemetaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial	100,00	%	1.295.239.286	0	-		495.239.286										

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

Penyusunan Bahan perumusan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan ummat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan ummat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	5	Dok .	100.000.000,00	0	-	1	200.000.000,00											
Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	0	-	-			50	295.239.286,00											

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

		an di daerah																	
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase keterlaksanaan fasilitasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100,00	%	5.010.022.986	50	1.173.987.500	100	550.000.000		155.820.000	0,00	155.820.000	0,00	28,33	25,00	1.329.807.500	25,00	26,54

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

5,1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial,	Persentas i Kebijakan Teknis dan Pelaksana an Pemetaan Kewaspa daan Nasional dan Penangan an Konflik sosial	100,00	%	5.010.022.986	50	1.173.987.500	100	550.000.000	155.820.000	0,00	155.820.000	0,00	28,33	25,00	1.329.807.500	25,00	26,54	
5.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembanga n bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Dokumen program Kerja di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantau an orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembang an bidang kewaspadaan serta penangan an konflik didaerah	4	Dok	80.000.000	0	-	1	20.000.000,00	0	-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	0,00	

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

5.1. 2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	56	Orang	1.440.000.000	0	-	14	360.000.000,00	15 5. 82 0. 00 0	0	155.8 20.00 0	0,0 0	4 3, 2 8	0	155.820.000	0 , 0 0	10,8 2	
-----------	---	---	----	-------	---------------	---	---	----	----------------	---------------------------------	---	---------------------	----------	-------------------	---	-------------	------------------	-----------	--

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

5.1. 3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	72	Org	1.745.011.493	29	1.173.987.500	12	150.000.000,00	-	0	-	0,00	0,00	29	1.173.987.500	40,28	67,28	
-----------	--	--	----	-----	---------------	----	---------------	----	----------------	---	---	---	------	------	----	---------------	-------	-------	--

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

5.1.4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	72	Laporan	1.745.011.493	0	-	1	20.000.000,00	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,000	0,00	
Rata - rata Capaian Kinerja (%)													0,00	11,35			#DIV/0!	#DIV/0!	
Predikat Kinerja													T	S					
Jumlah Total					49.169.708.867		13.683.233.610		8.741.215.237	1.18753.			0,00		14.865.987.437		30,23		

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

										82									
										7									
Faktor pendorong keberhasilan Kinerja					:														
Faktor penghambat keberhasilan kinerja					:														
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan II berikutnya					:														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah berikutnya:					:														

Tobelo,....Januari 2024
Kepala Badan Kesbangpol

Drs. Anwar S. Kabalmay
Nip. 196802021988031006

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan.

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pembinaan Pendidikan politik masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu pilkada;
2. Pembinaan pemahaman masyarakat tentang ideologi, wawasan kebangsaan, Bela Negara dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan budaya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
4. Pembinaan sosialisasi dan pelatihan Ormas, LSM dan OKP dengan sistem berbasis IT (SIOLA);
5. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran KOMINDA, FKUB, dan PKS;
6. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang banyak belum dapat terselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di wilayah Kabupaten Halmahera Utara dapat dikemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Halmahera Utara sebagai berikut :

1. Rendahnya pengelolaan manajemen perkantoran yang baik dan Bersih pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
2. Rendahnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas);

3. Rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengatasi potensi konflik;
4. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan serta terwujudnya ketahanan ekonomi, seni budaya dan kepercayaan;
5. Rendahnya peran organisasi kemasyarakatan, LSM dan OKP dalam pembangunan di daerah;

2.4. Reviu Rancangan Awal RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan surat menyurat;
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan karakter Kebangsaan.
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya politik;
 - Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik;
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya.
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial;

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Loka si	Targe t	Pagu Indikatif	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Loka si	Targe t	Pagu Indikatif
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum					Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum				
	Kesatuan Bangsa dan Politik					Kesatuan Bangsa dan Politik				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah		90,00	3.541.215.237	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah		90,00	3.582.739.096

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

1,1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)		100,00	17.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)		100,00	17.000.000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5	7.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5	7.000.000,00
1.1.1	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	2.000.000,00	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	2.000.000,00
1.1.1	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	2.000.000,00	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	2.000.000,00
1.1.1	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1	2.000.000,00	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1	2.000.000,00

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

1.1.1	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1	2.000.000,00	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1	2.000.000,00
1.1.1	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	2.000.000,00	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	2.000.000,00
1,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)		100,00	3.061.755.271	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)		100,00	3.061.755.271
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN		520	3.061.755.271,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN		520	3.061.755.271,00
1,3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)		100,00	30.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)		100,00	71.411.500

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		20	15.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		20	14.943.500,00
1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		1	15.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		1	56.468.000,00
1,4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)		100,00	145.459.966	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)		100,00	144.764.966
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7	25.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7	24.321.000,00
1.4.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	10.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	10.000.000,00
1.4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1	10.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1	10.000.000,00

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

1.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	20.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	19.984.000,00
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	80.459.966,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	80.459.966,00
1,5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		100,00	127.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		100,00	126.940.359
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	92.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	92.000.259,00
1.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	9.940.000,00
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	25.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	25.000.100,00

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

1,6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		100,0 0	160.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		100,0 0	160.867.000
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1	110.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1	110.880.000,00
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1	49.987.000,00
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan karakter Kebangsaan	Persentase keterlaksanaan fasilitasi penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		100,0 0	600.000.000	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan karakter Kebangsaan	Persentase keterlaksanaan fasilitasi penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		100,0 0	584.066.600

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

2,1	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100,00	600.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100,00	584.066.600
2.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaanyang Disusun		2	30.000.000,00	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaanyang Disusun		2	-
2.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun.		2	30.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun.		2	30.000.000,00

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		30	350.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		30	354.066.900,00
2.1.3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		10	165.000.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		10	164.999.600,00
2.1.4	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1	25.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1	35.000.100,00

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya politik.	Persentase keterlaksanaan fasilitasi peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik		100,0 0	3.454.760.714	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya politik.	Persentase keterlaksanaan fasilitasi peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik		100,0 0	2.515.364.600
3,1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		100,0 0	3.454.760.714	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		100,0 0	2.515.364.600

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

3.1.1	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Yang Disusun .		2	20.000.000,00	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Yang Disusun .		2	20.000.000,00
3.1.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		1	3.000.000.000,00	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		1	2.040.605.000,00

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

3.1.3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		20	54.760.714,00	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		20	74.759.600,00
3.1.4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		12	360.000.000,00	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		12	360.000.000,00

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

3.1.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1	20.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1	20.000.000,00
4	Pogram Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Persentase keterlaksanaan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		100	100.000.000	Pogram Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Persentase keterlaksanaan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		100	100.000.000
4,1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		100	100.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		100	100.000.000

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

4.1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		2	15.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		2	-
4.1.2	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		5	35.000.000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		5	-
4.1.3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		3	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		3	100.000.000

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase keterlaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya			495.239.286	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGA N KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase keterlaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya			469.239.200
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentasi Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemetaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial			495.239.286	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentasi Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemetaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial			469.239.200

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

	Penyusunan Bahan perumusan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah		1	200.000.000,00	Penyusunan Bahan perumusan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah		1	174.000.200,00
	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah		50	295.239.286,00	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah		50	295.239.000,00

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase keterlaksanaan fasilitasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial		100	550.000.000	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase keterlaksanaan fasilitasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial		100	549.999.600
5,1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial,	Persentasi Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemetaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial		100	550.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial,	Persentasi Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemetaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial		100	549.999.600
5.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitas kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Dokumen program Kerja di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitas kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah		1	20.000.000,00	Penyusunan Program Kerja di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitas kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Dokumen program Kerja di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitas kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah		1	-

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

5.1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah		14	360.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah		14	330.102.200,00
5.1.3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah		12	150.000.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah		12	192.910.400,00

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

5.1.4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah		1	20.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah		1	26.987.000,00
Rata - rata Capaian Kinerja (%)										
Predikat Kinerja										
Jumlah Total					8.741.215.237					7.801.409.096
Faktor pendorong keberhasilan Kinerja										
Faktor penghambat keberhasilan kinerja										
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan II berikutnya										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah berikutnya:										

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2019 berada pada tahap jangka menengah yang ke-lima yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.

Disamping memastikan sinkron dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Visi dan Misi Bupati Halmahera Utara Periode 2021 s.d 2026 adalah :

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan Dengan Inovasi Dan Investasi Dalam Kebersamaan Yang Berkeadilan “

Adapun Misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar;

3. Mewujudkan persamaan hak dan kedudukan bagi seluruh warga masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan;
4. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi kekayaan alam yang berwawasan lingkungan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta mengurangi angka kemiskinan;

Tugas pelayanan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 5 Tahun kedepan dengan melibatkan seluruh stakeholder dilingkungan Badan kesatuan Bangsa dan Politik. Tugas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2021 s.d 2026.

Hasil telaahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang faktor- faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan Wakil kepala daerah terpilih. adapun daftar telaahan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Telaah Tujuan/Sasaran K/L

Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan Dengan Inovasi Dan Investasi Dalam Kebersamaan Yang Berkeadilan “				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Faktor	
	KDH dan Wakil KDH terpilih		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 1 :	Masih adanya potensi konflik di masyarakat;	Kondisi Keamanan dan kenyamanan Lingk. Yang reatif tdk stabil	Adanya koordinasi dan kerja sama dengan pihak keamanan TNI/ Polri yang berada di Kabupten Halmahera Utara dalam menjaga gangguan Kamtibmas;
		Rendahnya Pengawasan dan Deteksi Dini terhadap masalah-masalah soial dan penangannya;	Peredaran miras;	
2		Rendahnya pemahaman masyarakat Terhadap batas-batas wilaya dan Kepemilikan tanah adat yang sering menimbulkan konflik sosial;	Letak geografis Kabupaten Halmahera Utara yang satu daratan dengan Kabupaten lain yang dapat menimbulkan kerawanan, sosial budaya dan ekonomi;	Adanya regulasi kementrian dalam Negeri;
			Potensi Konflik sosial akibat SARA dan dampak tekanan ekonomi;	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana;
3		Belum optimalnya partisipasi politik di masyarakat;	Rendahnya partisipasi masyarakat;	Partisipasi Masyarkat yang tinggi untuk mengikuti pembinaan dan pendidikan tersebut.;
			Kurangnya Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkatkan soialisa dan pendidikan politik bagi masyarakat pemilih pemula dan lainnya.

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

			Kondisi sosial Politik yang cukup stabil yang di tandai dengan suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Gubernur dan Pilihan Bupati
		Kurangnya alokasi anggaran dan rendahnya koordinasi antar sektor;	Makin terbukanya komunikasi politik antara infra dan supra struktur politik;
4	Belum adanya Harmonisasi Ormas dengan Perguruan Tinggi dalam mensukseskan Pemilu serentak	Kurangnya kerja sama yang baik	akses komunikasi dan sosialisasi lebih ditingkatkan
	Belum terdata lengkap sebagian Ormas dan LSM;	Banyaknya Ormas dan LSM yang tidak melapor/tdk mendaftarkan diri pemerintahan Daerah;	Tingkatkan sosialisasi ke masyarakat atau ormas dan LSM betapa pentingnya pelaporan data
			Meningkatnya peran Forum Ormas dan LSM;
	Bergesernya rasa nasionalisme akibat pengaruh era globalisasi dan IT;	Kurangnya SDM aparatur yang berbasis IT;	Kemudahan akses informasi dan komunikasi yang berbasis IT.
5	Menurunnya wawasan kebangsaan rasa nasionalisme dan bela Negara;	kurangnya sosialisasi ke Masyarakat dan lembaga pendidikan tentang Wawasan Kebangsaan dan Belanegara (NKRI)	tingkatkan pemahaman tuk usia dini bagaimana pentingnya Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara (NKRI)
	Kurangnya Kegiatan Forum kerukunan antar umat beragama;	Penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang multi etnis, agama dan budaya;	Adanya peran Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda;
		Kurangnya daya literasi masyarakat;	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana;

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara telah menetapkan Visi dan Misinya selama lima tahun ke depan (2021-2026) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visinya adalah :

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan Dengan Inovasi Dan Investasi Dalam Kebersamaan Yang Berkeadilan “

Adapun Misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar;
3. Mewujudkan persamaan hak dan kedudukan bagi seluruh warga masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan;
4. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi kekayaan alam yang berwawasan lingkungan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta mengurangi angka kemiskinan;

3.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan akan mengarahkan perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Dengan berlandaskan Misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun Tahun 2021-2026 menetapkan tujuan :

Tabel 3.2
Tujuandan Sasaran Jangka Menengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI KERJA AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						PADA AKHIR PERIODE
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	Mewujudkan Masyarakat yang Berwawasan Kebangsaan, berkualitas pendidikan politik serta meningkatkan kerukunan dan keamanan.		Menurunnya Angka Kriminalitas	108	103	98	93	88	84	80	80
II		Meningkatnya kualitas pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang mendorong partisipasi, kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Presentase Desa yang Bebas Potensi Kerawanan Konflik Sosial	75,5	76,0	77,0	78,1	79.60	82,1	86,2	86,2
III		Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	43,20	50	56	60	60	70	70	80

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kabupaten Halmahera Utara. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung fungsi penunjang urusan Pemerintahan Umum tahun 2024 adalah sebagai berikut :

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	TAHUN 2024
--	-----------------------------

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2024

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah		90%	3.803.055.271,00	DAU
8.01.01.02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (%)	Badan Kesbangpol	100%	28.500.000,00	DAU
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	5 Dok	6.000.000,00	DAU
8.01.01.2.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	1 Dok	3.500.000,00	DAU
8.01.01.2.01.03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Badan Kesbangpol	1 Dok	3.500.000,00	DAU

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	TAHUN 2024
--	-----------------------------

		Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
8.01.01.2.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	1 Dok	3.500.000,00	DAU
8.01.01.2.01.05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	1 Dok	3.500.000,00	DAU
8.01.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Kesbangpol	1 Laporan	3.500.000,00	DAU
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Halmahera Utara	5 Laporan	5.000.000,00	DAU
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (%)	Kab. Halmahera Utara	100%	3.061.755.271,00	DAU
8..01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesbangpol	520 OB	3.061.755.271,00	DAU
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	65.800.000,00	DAU
8.01.01.2.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Badan Kesbangpol	26 Paket	20.800.000,00	DAU
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar daerah	4 OK	45.000.000,00	DAU

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	TAHUN 2024
--	-----------------------------

8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah (%)		100%	327.000.000,00	DAU
8..01.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Kesbangpol	9 Paket	30.000.000,00	DAU
8..01.01.2.06.02	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Badan Kesbangpol	1 Paket	15.000.000,00	DAU
8..01.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Badan Kesbangpol	1 Dokumen	10.000.000,00	DAU
8..01.01.2.06.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Badan Kesbangpol	1 Laporan	12.000.000,00	DAU
8..01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	1 Laporan	260.000.000,00	DAU
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah (%)			150.000.000,00	DAU
8..01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Kesbangpol	1 Laporan	100.000.000,00	DAU
8..01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Kesbangpol	1 Laporan	10.000.000,00	DAU
8..01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Badan Kesbangpol	1 Laporan	40.000.000,00	DAU
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (%)		100%	170.000.000,00	DAU

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	TAHUN 2024
--	-----------------------------

8..01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Badan Kesbangpol	1 Unit	120.000.000,00	DAU
8..01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Badan Kesbangpol	1 Unit	50.000.000,00	DAU
08:01:02	PROGRAM PENGUATAN IDIOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER BANGSA	Persentase keterlaksanaan fasilitasi penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		100	1.350.000.000,00	DAU
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100	1.350.000.000,00	DAU
8..01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Luar Dearah dan dalam Daerah	30 Orang	1.100.000.000,00	DAU
8..01.02.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Luar Dearah dan dalam Daerah	10 Orang	195.000.000,00	DAU

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	TAHUN 2024
--	-----------------------

8..01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Halmahera Utara / kesbangpol	1 Lap	55.000.000,00	DAU
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase keterlaksanaan fasilitas peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik		100	4.491.910.700,00	DAU
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		100	4.491.910.700,00	DAU
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Badan Kesbangpol	1 Laporan	3.000.000.000,00	DAU

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

		di Daerah yang Disusun				
8..01.03.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Luar daerah dan dalam daerah	20 Orang	816.910.700,00	DAU
8..01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Luar daerah dan dalam daerah	24 Orang	630.000.000,00	DAU

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

8..01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Halmahera Utara / kesbangpol	1 Laporan	45.000.000,00	DAU
8.01.14	Pogram Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Persentase keterlaksanaan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		100	100.000.000,00	DAU
8.01.04.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		100	100.000.000,00	DAU
8..01.04.2.01.02	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Luar daerah dan dalam daerah	3 Orang	100.000.000,00	DAU

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	TAHUN 2024
--	-----------------------------

8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase keterlaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya		100	200.000.000,00	DAU
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentasi Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemetaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial		100	200.000.000,00	DAU
8.01.05.1.04	Penyusunan Bahan perumusan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan ummat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan ummat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Kabupaten Halmahera Utara / kesbangpol	1 Dok	200.000.000,00	DAU
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase keterlaksanaan fasilitasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial		100	1.050.000.000,00	DAU
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Persentasi Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemetaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial		100	1.050.000.000,00	DAU

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN
2024**

8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Luar daerah dan dalam daerah	14 Orang	560.000.000,00	DAU
8.01.06.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitas kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitas kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah	Luar daerah dan dalam daerah	12 Orang	450.000.000,00	DAU
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitas kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitas kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah	Kabupaten Halmahera Utara / kesbangpol	1 Laporan	40.000.000,00	DAU
TOTAL BELANJA					10.994.965.971,00	



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen rencana tahunan. Penetapan program dan kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Untuk itu dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2024, masing-masing Bidang dalam jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara, berpedoman Pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja ini, demi terciptanya sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang diharapkan.

Penyusunan rencana biaya pelaksanaan program dan kegiatan kiranya mempertimbangkan efisiensi secara rasional dan proporsional. Oleh karena itu perlu disusun prioritas program dan kegiatan sesuai aspek-aspek yang dinilai strategis. Disamping hal tersebut disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini sangat dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi semua pihak yang terkait dengan memperhatikan manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan bagi masyarakat dalam upaya mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan. Terima kasih.

Tobelo, 9 Januari 2024

Kepala Badan KESBANGPOL



Drs. Anwar S. Kabalmay

PEMBINA TK I. IV/b

NIP. 196802021988031006